

**PEMANFAATAN SUKUK RITEL DALAM PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR**

**Binti Nur Asiyah^{1*)}, Dwi Astuti Wahyu Nurhayati²⁾, Novi Tri Oktavia³⁾,
Jamilatun Ni'mah⁴⁾**

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

^{1*} E-mail: binti.nur.asiyah@uinsatu.ac.id

² Email: dwi.astuti@uinsatu.ac.id

³ E-mail: novitrioktavia@yahoo.com

⁴ E-mail: milanikmah191@gmail.com

Abstract

This research background arises because Local Governor of East Kalimantan is not ready to implement the spirit of decentralization in strengthening the fiscal of local governor to build their own infrastructure. So the infrastructure of area East Kalimantan is not provided maximally to allow the prosperity for the society. Sukuk is one of the alternatives which could be taken by the Local governor to finance the establishing infrastructure of the area of East Kalimantan. This research used descriptive qualitative design to capture the using of sukuk fund in financing the establishing infrastructure of the area in East Kalimantan. The collecting of data was used by the researcher related to the role of sukuk in financing infrastructure of establishing the area of East Kalimantan in the form of secondary data which was relevant with the topic. The result of the study showed that the retail bonds has been used in the area of East Kalimantan in financing of establishing infrastructure of The Kalimantan Institute in 2019, Integrated Laboratory on 2020, The Airport of APT Pranoto from 2020, the infrastructure of State Polytechnic of Balikpapan on 2021, the housing army of TNI AD in 2021, MAN Insan Cendikia Paser from 2018.

Keywords : East Kalimantan, Infrastructure Development, Sukuk

1. PENDAHULUAN

Negara mengemban amanat untuk kesejahteraan hidup rakyat. Terwujudnya kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat menjadi tujuan utama bagi suatu negara. Karena negara berperan penting dalam menunjang pembangunan ekonomi rakyat. Dalam hal ini negara harus mampu memenuhi kebutuhan hidup warga negara. Al-Mawardi (2019) berpendapat bahwa kebutuhan hidup suatu warga negara menjadi tanggung jawab yang wajib dipenuhi oleh negara. Sehingga negara harus menerapkan sistem ekonomi yang adil, jujur, dan aman supaya stabilitas ekonomi rakyat mampu berkembang dengan baik. Apabila suatu negara kurang memperhatikan perekonomian rakyatnya maka dapat dipastikan ekonomi suatu negara

tersebut tidak akan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Hal ini yang menjadi faktor utama suatu negara dijuluki dengan negara berkembang karena ekonomi suatu negara tersebut hanya bertahan pada tahap ekonomi berkembang tidak mengalami adanya suatu kemajuan (Ade Sisi, 2022).

Ekonomi berkembang diartikan sebagai suatu kondisi dimana perekonomian negara tidak mengalami perkembangan yang baik dengan standar hidup rakyat yang relatif rendah. Negara dengan sistem perekonomian berkembang hanya mampu menghasilkan pendapatan yang standar tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh negara maju. Sebab apabila ekonomi suatu negara sedang berkembang maka industri negara tersebut juga berada pada posisi

berkembang. Namun, jika perkembangan ekonomi suatu negara mengalami kemajuan yang pesat maka industri negara tersebut juga mengalami kemajuan yang signifikan. Sehingga negara harus memberikan sarana dan prasarana yang menunjang adanya perkembangan industri (Usman, 2012). Oleh karena itu, pembangunan dilakukan dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan untuk mencapai kemakmuran yang merata.

Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam menunjang kemajuan suatu industri suatu negara yaitu tersedianya infrastruktur yang baik dan memadai. Infrastruktur merupakan aset terpenting bagi pertumbuhan ekonomi dan daya saing suatu negara atau wilayah. Tersedianya infrastruktur dapat mendorong perkembangan ekonomi Negara (KPBU, 2022). Sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi, infrastruktur mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam pengembangan daerah. Perkembangan kapasitas infrastruktur di suatu daerah sebanding dengan perkembangan perekonomiannya (Chatio dan Rao, 2017). Hal ini karena perkembangan ekonomi telah menuntut ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai. Keberadaan infrastruktur mendorong peningkatan produktivitas faktor-faktor produksi. Perbaikan infrastruktur meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, karena investasi akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Menurut Sukawika (2018), investasi memainkan peranan penting dalam menentukan penyerapan tenaga kerja. Infrastruktur yang baik juga akan merangsang peningkatan pendapatan masyarakat, karena aktivitas ekonomi yang semakin meningkat sebagai akibat mobilitas faktor produksi dan aktivitas perdagangan yang semakin tinggi. Dengan demikian, perkembangan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat dan saling tergantung satu sama lain. Ketimpangan pembangunan infrastruktur yang terjadi juga akan berperan terhadap kesenjangan pembangunan ekonomi yang berujung pada ketimpangan kesejahteraan rakyat.

Perekonomian Indonesia saat sedang mengalami ketidakmerataan di beberapa kawasan

yaitu kawasan Timur Indonesia dengan kawasan Barat Indonesia dan lingkup pulau yang terdiri dari Pulau Jawa dengan beberapa pulau lainnya. Terjadinya ketimpang ekonomi di Indonesia dapat di ketahui dari data laporan *Institute for Management Development (IMD) World Competitive Year book 2022* sebagai berikut:

Tabel 1. Indeks Daya Saing Performa Ekonomi Indonesia



Sumber : *Institute for Management Development (IMD) World Competitive Year book 2022*.

Institute for Management Development (IMD) merupakan database daya saing antar negara yang spesifik dan menyeruh. Dalam data laporan *Institute for Management Development (IMD) World Competitive Year book 2022* yang digambarkan pada tabel 1.1 memperlihatkan adanya keterpurukan performa ekonomi di Indonesia pada tahun 2022. Bahkan dalam data indeks daya saing performa ekonomi Indonesia pada tabel 1.1 menunjukkan peringkat performa ekonomi di Indonesia tahun 2022 menjadi penurunan yang sangat tajam dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sejak 2022. Dimana pada tahun 2018 performa ekonomi Indonesia menempati peringkat 27, kemudian naik ke peringkat 25 pada tahun 2019. Penurunan 1 peringkat performa ekonomi Indonesia terjadi pada tahun 2020 menjadi peringkat 26. Penurunan peringkat performa ekonomi Indonesia kembali terjadi di tahun 2021 dengan menempati posisi peringkat 35, dan terus menurun hingga tahun 2022 berada pada peringkat 42.

Data yang dilaporkan oleh *Institute for Management Development (IMD) World Competitive Year book 2022* menjelaskan bahwa dalam 5 tahun terakhir sejak 2018 hingga 2022

performa ekonomi Indonesia mengalami penurunan setiap tahun kecuali pada tahun 2019 yang mengalami peningkatan performa ekonomi Indonesia kembali menurun di tahun 2020 dan terus terjadi penurunan hingga tahun 2022. Penurunan performa Indonesia tersebut terjadi karena adanya ketimpangan ekonomi yang disebabkan oleh kurangnya kapasitas infrastruktur yang memadai di hampir setiap daerah.

Menurut Todaro (2006) pertumbuhan ekonomi pada negara berkembang seperti Indonesia banyak terkendala oleh kurangnya infrastruktur yang memadai, rendahnya SDM kelembagaan, dan pasar barang. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur di beberapa daerah sebagai pemerataan ekonomi. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo hendak memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur (Kominfo, 2022).

Pemindahan ibu kota penting untuk dilakukan karena dapat merefleksikan kebutuhan pemerataan pembangunan ekonomi, non-Jawa dan non-Jakarta sentris (Dian Herdiana, 2022). Secara geografis letak Ibu Kota Negara yang baru berada pada titik tengah Negara Indonesia sehingga bagian untuk pemerataan ekonomi juga sebagai langkah dalam proses pemulihan ekonomi yang belum merata khususnya wilayah timur. Pemerataan ekonomi dilakukan sebagai upaya negara dalam memulihkan ekonomi yang tidak merata di beberapa wilayah sehingga perlu adanya perpindahan Ibu Kota Negara sebagai daya tarik wilayah timur Indonesia untuk memajukan kawasan industri dalam pertumbuhan ekonomi di daerah (Slamet Pribadi, 2021).

Kalimantan Timur sampai saat ini masih belum mampu untuk memperkuat kemandirian fiskal kotamadya (Pemda) guna melakukan pembangunan daerah jauh. Seluruh pemerintah daerah Kalimantan Timur masih menaruh harapan besar pada pemerataan dana (transfer) dari pusat untuk menghindari adanya defisit. Sementara itu, tingginya beban pengeluaran pribadi yang rata-rata mencapai 50% menyerap distribusi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

(APBD) seharusnya dapat dioptimalkan untuk pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur.

Hasil Indeks Kepuasan Infrastruktur (IKLI) Kalimantan Timur masih berada pada level wajar dengan nilai 5,9 dari skala 1-10. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kalimantan Timur harus lebih kreatif menggunakan instrumen lain untuk pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur yang masih kurang memadai. Instrumen Sukuk dapat menjadi solusi yang sangat memungkinkan untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan percepatan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur.

Sukuk adalah surat berharga dalam bentuk sekuritisasi yang mengikuti prinsip syariah di pasar modal. Sukuk adalah representasi kepemilikan relatif aset selama periode waktu tertentu, dengan risiko dan manfaat yang terkait dengan arus kas melalui aset dasar yang dipegang oleh investor. Dibandingkan dengan obligasi daerah, Sukuk lebih terjamin karena memiliki latar belakang yang jelas yaitu proyek infrastruktur daerah yang akan dibiayai. Sukuk merupakan instrumen yang menggunakan pendekatan investasi, bukan utang seperti obligasi. Oleh karena itu, penerbitan Sukuk Daerah tidak mendorong pemerintah daerah Kalimantan Timur berutang tetapi menjadi opsi pembiayaan yang sangat memungkinkan agar pembangunan daerah Kalimantan Timur sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur yang telah disahkan.

Untuk memudahkan penerbitan Sukuk Daerah oleh pemerintah daerah Kalimantan Timur, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan tiga peraturan yang terdiri dari (1) Peraturan OJK No. 61/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pendaftaran Keikutsertaan dalam Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, (2) Peraturan OJK No. 62/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Mempersingkat Satu Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah atau Sukuk Daerah, dan (3) Peraturan OJK No. 63/POJK.04/2017 tentang Laporan dan Pemberitahuan Emiten Obligasi Daerah atau Sukuk Daerah.

Sukuk Daerah menjadi instrumen pembiayaan yang atraktif bagi investor muslim maupun non muslim luar negeri. Hal ini telah terlihat dari adanya praktik penerbitan Saxony Anhalt Islamic Municipal Bond di Saxony-Anhalt, Jerman sebagai salah satu pembiayaan APBD dengan akad Ijarah dan mekanisme pembiayaan dengan Underlying Asset Riil. Selain Saxony-Anhalt, Jerman, Pasir Gudang Johor Malaysia juga telah melakukan praktik penerbitan Sukuk Daerah (Dedi Mainata, 2017). Sukuk Daerah masih sedikit dipraktikkan pada daerah yang berada di wilayah Indonesia, namun, dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa daerah di Indonesia yang telah menerbitkan Sukuk Daerah.

Hasil penelitian yang telah dilakukan Irwan Suriadi dkk (2020) menyatakan bahwa dengan adanya praktik penerbitan Sukuk Daerah di Nusa Tenggara Barat memberi peluang kepada pemerintah daerah dalam memperoleh sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur. Disamping itu, hasil dari penelitian Rais Muhammad Falah (2021) adalah penerbitan Sukuk Daerah memberi manfaat dalam menanggulangi permasalahan pembiayaan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Barat. Sejalan dengan hal tersebut, Penelitian yang dilakukan oleh Novia Khairunnisa (2021) mengemukakan hasil bahwa penerbitan sukuk menjadi alternatif dalam pembiayaan pembangunan Infrastruktur di Aceh. Temuan dari hasil penelitian Fahri (2021) menunjukkan bahwa Sukuk sangat memberi kontribusi pada pembangunan daerah di Provinsi Jambi.

Kalimantan Timur memiliki potensi besar untuk melakukan praktik penerbitan Sukuk Daerah dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, aset daerah yang likuid disertai rata-rata kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur telah mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan adanya wacana pemindahan Ibu Kota Negara di daerah Kalimantan Timur maka kebutuhan pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan guna merealisasikan pemindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur.

Menyadari besarnya potensi Kalimantan Timur dalam menerbitkan Sukuk Daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur dalam rangka merealisasikan pemindahan Ibu Kota Negara yang telah diwacanakan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Ir.H. Joko Widodo, maka penelitian ini perlu dilakukan sebab berdasarkan dari observasi yang telah dilakukan oleh peneliti mencermati masih sedikit atau terbatasnya penelitian yang membahas tentang **“Pemanfaatan Sukuk Ritel dalam Pembiayaan Infrastruktur Pembangunan Daerah Kalimantan Timur”**.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif disertai penggunaan pendekatan kualitatif. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif sebab dalam penelitian ini, peneliti memiliki tujuan hendak mendeskripsikan penggunaan dana sukuk ritel dalam membiayai infrastruktur daerah Kalimantan Timur sebagai dasar adanya penerbitan sukuk. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hasil penelitian yang diperoleh peneliti akan dijelaskan berupa kalimat atau kata-kata, dan bukan dalam bentuk data statistik. Hal ini sejalan dengan teori penelitian yang digagas oleh Prof. Sugiyono yang menyatakan bahwa deskriptif kualitatif sebagai metode penelitian dengan mendeskripsikan atau menguraikan peristiwa atau fenomena yang sedang dilakukan penelitian atau pengkajian (Sugiyono, 2017).

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder atau *studi kepustakaan* sebagai ulasan mengenai landasan teori penelitian yang disusun secara *systematic literature review* (susunan dari teori yang paling mendasar, disusun secara berurutan). Dengan kata lain, *studi kepustakaan* berisi teori terkait dengan data yang akan dianalisis. *Studi kepustakaan* digunakan sebagai pisau bedah, terutama untuk menganalisa data dalam penelitian ini, termasuk keterbaruan dan menemukan kekosongan penelitian (Dwi Astuti, 2020). Metode pengumpulan data studi

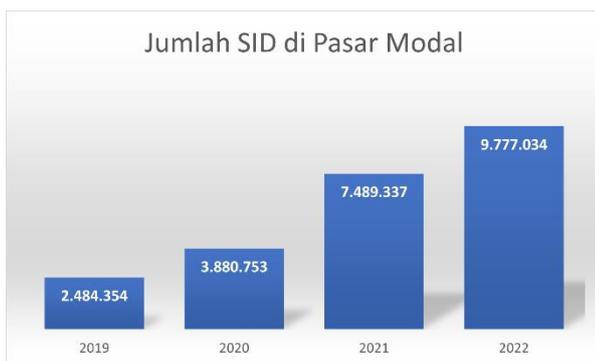
kepastakaan dilakukan dalam berbagai data sekunder yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan penggunaan sukuk ritel di Kalimantan Timur dalam bentuk website kemenkeu, jurnal, artikel, buku, dan laporan penelitian lainnya. Dimana data sekunder yang digunakan tersebut dapat memberikan gambaran terkait topik pembahasan penggunaan sukuk ritel di Kalimantan Timur yang tengah dikaji oleh peneliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Sejak tahun 2018, Sukuk Ritel banyak diminati oleh Generasi Y atau Milenial yang terlahir antara 1980 hingga 1993 dengan rentang usia 25 sampai 38 tahun. Hal ini dapat dikatakan karena 45% investor Sukuk Ritel adalah Generasi Y (Milenial). Tingginya minat masyarakat terutama Generasi Milenial terhadap Sukuk Ritel menjadikan jumlah investor di Pasar Modal terus mengalami peningkatan seperti yang tertera pada tabel 3.1.1 berikut:

Tabel 3. Jumlah SID di Pasar Modal



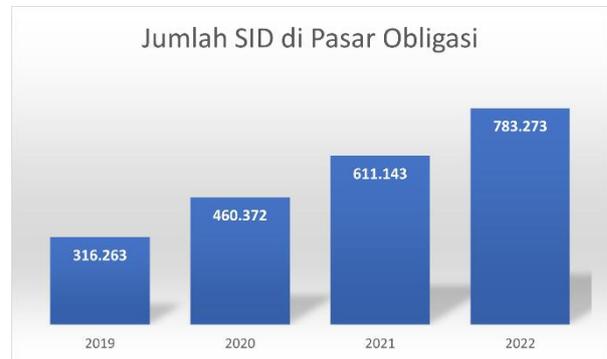
Sumber : DJPPR Kemenkeu 2022

Pada tahun 2019 jumlah *Single Investor Identification* (SID) sebanyak 2.484.354 yang kemudian meningkat 56,21% menjadi 3.880.753 SID pada tahun 2020. Peningkatan jumlah SID kembali terjadi pada tahun 2021 dengan presentase mencapai 92,99% masyarakat yang tergabung menjadi 7.489.337 SID. Jumlah Investor di Pasar Modal terus meningkat hingga 30,55% yang menjadikan 9.777.034 SID.

Pada tabel 3.1.1 telah dijabarkan data terkait tingginya minat masyarakat untuk menjadi *Single Investor Identification* (SID) Sukuk Ritel.

Sementara itu, meskipun mengalami peningkatan jumlah SID setiap tahunnya, namun jumlah SID di Pasar Obligasi tidak sebanding dengan jumlah SID di Pasar Modal. Pernyataan ini dibuktikan dengan data pada tabel 3.1.2:

Tabel 2 Jumlah SID di Pasar Obligasi



Sumber : DJPPR Kemenkeu 2022

Pada tabel 3.1.2 disampaikan jumlah SID di Pasar Obligasi pada tahun 2019 sejumlah 316.263 SID. Kemudian di tahun 2020, Pasar Obligasi mengalami peninggatan mencapai 45,57% dengan 460.372 SID menjadi bagian dari Pasar Modal. Tahun 2021 jumlah investor di Pasar Obligasi menjadi 611.143 SID dengan peningkatan sebesar 32,75%. Peningkatan sebesar 28,17% jumlah SID kembali terjadi pada 2022 dengan jumlah SID saat ini mencapai 783.273 SID (Kemenkeu, 2022).

Pemaparan data jumlah Obligasi pada tabel 3.1.2 tersebut membuktikan bahwa jumlah SID di Pasar Obligasi sangat terlampaui jauh dengan jumlah SID di Pasar Modal walaupun mengalami peningkatan jumlah SID setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terutama pada Generasi Milenial sangat terhadap Sukuk Ritel dengan antusias partisipasi investor ritel yang terus meningkat setiap tahunnya.

Sukuk Ritel telah diterbitkan sejak tahun 2013 yang berperan dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur yang disebut dengan Sukuk Proyek. Sejak tahun 2013 hingga 2022 sudah ada 4.316 proyek yang dibangun menggunakan dana Sukuk Proyek dengan anggaran mencapai Rp. 175,37 Triliun.

Tabel 4. Kontribusi Sukuk Ritel dalam Pembangunan

No.	Proyek	Jumlah	Anggaran
1	Infrastruktur & Transportasi	1.446	Rp. 142,26 T
2	Pendidikan & Riset	1.038	Rp. 22,19 T
3	Keagamaan	1.578	Rp. 4,32 T
4	Pertahanan & Keamanan	222	Rp. 3,04 T
5	Lain-lain	32	Rp. 975 M

Sumber : DJPPR Kemenkeu 2022

Berdasarkan pada tabel 3.1.3 menunjukkan bahwa Sukuk Ritel telah digunakan dalam sejumlah 1.446 proyek infrastruktur dan transportasi yang membutuhkan dana sebesar Rp. 142,26 Triliun. Selain itu, terdapat 1.038 proyek pendidikan dan riset telah dibangun dengan menggunakan dana Sukuk Ritel sebesar Rp. 22,19 Triliun. Sukuk Ritel juga telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 4,32 Triliun untuk pembiayaan 1.578 proyek keagamaan. Tidak hanya itu, 222 proyek pertahanan dan keamanan turut menggunakan dana Sukuk Ritel sebesar Rp. 3,04 Triliun. Selebihnya terdapat dana Sukuk Ritel sebesar Rp 975 Miliar yang digunakan untuk pembiayaan 32 proyek lainnya (Kemenkeu, 2022).

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022, Pemerintah telah menganggarkan dana senilai Rp 365,8 triliun untuk mewujudkan infrastruktur (Kemenkeu, 2022).

Tabel 5 Indeks Daya Saing Infrastruktur Indonesia



Sumber : *Institute for Management Development (IMD) World Competitive Year book 2022*

Hasilnya pada tabel 3.1.4 menunjukkan data *Institute for Management Development (IMD) World Competitive Year book 2022* menunjukkan Indeks Daya Saing Infrastruktur Indonesia berada di peringkat 52. Peringkat ini merupakan yang tertinggi yang diraih Indonesia dalam lima tahun terakhir. Peringkat ke-59 di tahun 2018, ke-53 di tahun 2019, ke-55 di tahun 2020, ke-57 di tahun 2021, dan ke-52 di tahun 2022.

3.2.Pembahasan

Pemerintah memberikan penawaran kepada Warga Negara Indonesia (WNI) untuk berkontribusi secara langsung dalam mendukung pembangunan nasional melalui investasi Sukuk Negara. Sebab hasil investasi dari Sukuk Negara dipergunakan dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur yang dijadikan investasi sebagai perekat hubungan kebangsaan menuju kemandirian bangsa (Kemenkeu, 2022).

Surat Berharga Syariah Ngera (SBSN) merupakan instrumen berupa surat berharga yang dijadikan produk investasi oleh Warga Negara Indonesia. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ini biasa disebut dengan istilah Sukuk Negara. Di Indonesia, Sukuk Negara merupakan salah satu instrumen pembiayaan infrastruktur yang digunakan untuk mewujudkan pembangunan daerah (Kemenkeu, 2022). Dalam Sukuk Negara terdapat 2 jenis yang dapat diperdagangkan yaitu Sukuk Ritel dan tidak dapat diperdagangkan yaitu Sukuk Tabungan (Bareksa, 2022).

Tujuan dari adanya penerbitan Sukuk Negara yaitu untuk membiayai defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan membiayai proyek dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, Sukuk Negara dapat dimanfaatkan sebagai instrumen fiskal dan investasi, meningkatkan pertumbuhan pasar keuangan syariah, mendorong perkembangan industri dalam negara, mengoptimalkan pengelolaan barang milik negara dan sebagai acuan dalam imbal hasil (*benchmark yield*) pada penilaian harga instrumen keuangan syariah lainnya.

Sukuk Ritel merupakan produk keuangan Indonesia yang diterbitkan oleh Negara dengan prinsip syariah yang diperuntukkan pada investor secara individu oleh Warga Negara Indonesia sebagai bentuk investasi yang mudah, aman, dan terjangkau, serta menguntungkan investornya. Karakteristik Sukuk Ritel yaitu diperuntukkan Warga Negara Indonesia (WNI) secara individu, Investasi dikelola berdasarkan prinsip syariah, Dapat dipesan mulai dari Rp. 1000.000, Lamanya jangka waktu peminjaman 3 tahun, Setiap bulan imbalan tetap dibayarkan, Dapat diperjualbelikan antar investor domestik di pasar sekunder.

Sukuk Ritel merupakan instrumen yang ditujukan kepada individu Warga Negara Indonesia (WNI) karena individu investor menjadi alternatif pada saat maraknya perusahaan yang terdampak krisis ekonomi ditengah guncangan keadaan krisis keuangan global saat ini. Selain itu, belum adanya pelayanan loyalis syariah meskipun sudah ada Obligasi Ritel Indonesia (ORI). Hal ini terjadi karena investor menghendaki adanya ORI berbasis syariah. Sehingga peristiwa ini sangat berkaitan dengan resi yang ditawarkan kepada investor yang mengharapkan adanya produk syariah.

Kesesuaian syariah dalam Sukuk Ritel yaitu Sukuk Ritel dikelola dengan prinsip syariah, bebas dari unsur *gharar* atau ketidakjelasan, unsur *usury* atau riba, dan unsur *maysir* atau perjudian, serta Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menyetujui kesesuai Sukuk Ritel dengan Syariah. Akad Ijarah – *Asset to be Leased* merupakan struktur yang digunakan dalam penerbitan Sukuk Ritel (Syifa Fauziah, 2020). Dana hasil penerbitan Sukuk Ritel dipergunakan untuk kegiatan investasi dalam bentuk pembelian hak manfaat Barang Milik Negara dan pengadaan proyek yang kemudian disewakan kepada Pemerintah. Imbalan yang diberikan Sukuk Ritel merupakan hasil dari keuntungan kegiatan investasi tersebut (Bareksa, 2022).

Tujuan dari adanya praktik penerbitan Sukuk Ritel yaitu untuk pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pembiayaan pembangunan infrastruktur APBN, mengembangkan basis investor dalam negeri,

mendorong perluasan dan kestabilan pasar keuangan syariah, dan memberikan produk investasi atau diversifikasi investasi pada investor individu (Baresta, 2020). Dapat disimpulkan bahwa tujuan utama diterbitkannya Sukuk Ritel adalah untuk pembiayaan infrastruktur pembangunan daerah di Indonesia.

Ada 1.446 proyek infrastruktur dan transportasi yang telah dibangun menggunakan dana Sukuk Ritel sebesar Rp. 142,26 Triliun untuk pembiayaan 873 proyek infrastruktur transportasi sebesar Rp 113,32 Triliun dan Dana sebesar Rp. 30,94 Triliun untuk pembiayaan 673 proyek Sumber Daya Air. Pemerintah juga telah mengalokasikan Sukuk Ritel sebesar Rp. 22,19 Triliun untuk pembangunan sejumlah 1.038 proyek Pendidikan dan Riset yang terdiri dari 283 pembangunan Kampus Perguruan Tinggi Keislaman Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan pembiayaan Sukuk Ritel sebesar Rp. 12,82 Triliun, pembiayaan 733 proyek Politeknik Negeri dan Madrasah senilai Rp. 6,27 Triliun, dan dana sejumlah Rp. 3,095 Triliun untuk pembiayaan 22 proyek Laboratorium (Riset).

Dana Sukuk Ritel sebanyak Rp. 4,32 Triliun telah dianggarkan dalam 1.578 proyek Keagamaan dengan rincian dana sebesar Rp. 4,18 Triliun pada 1.577 proyek Haji, Umrah, dan KUA, dan Rp. 148,9 Miliar untuk 1 proyek Produk Halal. Ada 32 Proyek lainnya yang menganggarkan dana Sukuk Ritel Rp. 975 Miliar. Pembangunan 222 proyek Pertahanan dan Keamanan telah menghabiskan dana Sukuk Ritel untuk 166 proyek Perumahan Kemhan mencapai dana Rp. 2,54 Triliun, dan Perumahan Polri dengan pembiayaan sebesar Rp. 508 Miliar. Selain itu, ada 6 proyek Pertanian yang dibiayai oleh Sukuk Ritel sejumlah Rp. 206 Miliar, 1 proyek Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memanfaatkan Rp. 145 Miliar dana Sukuk Ritel dan Sejumlah 25 proyek Taman Nasional yang menghabiskan dana Sukuk Ritel mencapai Rp. 624 Miliar. Keseluruhan total ada 4.316 proyek yang dibiayai oleh Sukuk Ritel dengan alokasi dana sebesar Rp. 175,37 Triliun (Baresta, 2022).

Contoh infrastruktur yang dibangun menggunakan dana Sukuk Ritel (Anisa Ilmia, 2020) diantaranya:

1. Pembangunan Tol Solo – Ngawi seksi I – Colomadu Karanganyar Jawa Tengah.
2. Pembangunan *Ramp on/off Flyover* Amplas Medan.
3. Pembangunan Jalan Gerung Mataram Nusa Tenggara Barat.
4. Pembangunan Pusat *Konservasi Sanctuary* Hiu Paus Taman Nasional Teluk Cendrawasih, Papua.
5. Pembangunan Jembatan Youtefa (Holtekamp) – Papua, Jembatan Pulau Balang Samarinda – Kalimantan Timur, dan Jembatan Musi 4 Palembang – Sumatera Selatan.
6. Pembangunan Gedung Perkuliahan IAIN Salatiga - Jawa Tengah, UIN Sunan Gunung Jati Bandung - Jawa Barat, UIN Manado - Sulawesi Utara, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung- Jawa Timur.
7. Pembangunan Asrama haji Makassar Sulawesi Selatan dan Revitalisasi Asrama Haji Medan Sumatera Selatan.
8. Pembangunan Jalur Kereta Double Track Selatan Jawa Cirebon-Kroya-Solo-Madiun-Jombang dan Doule Track KA Manggarai-Cikarang Jawa Barat.
9. Pembangunan Terowongan KA Notog – Banyumas, Jawa Tengah.

Selain itu, masih banyak infrastruktur yang sedang, akan, dan telah selesai dibangun dan dikembangkan menggunakan dana Sukuk Ritel seperti halnya pembangunan dan pengembangan daerah Kalimantan Timur yang didukung dengan pembiayaan dana Sukuk Ritel saat ini (IKN, 2022).

Pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke daerah Kalimantan Timur yang telah diumumkan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Ir.H. Joko Widodo melalui pidatonya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 menjadikan Pemerintah terus menyiapkan infrastruktur sejalan dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur yang ditargetkan akan

direalisasikan pada semester pertama 2024 (Ristawati, 2020). Pembangunan Ibu Kota Negara yang telah direncanakan akan dilakukan pembangunan infrastruktur secara bertahap mulai dari Istana Negara yang akan dibangun dengan lahan seluas 100 hektar, Kawasan Pemukiman yang dibutuhkan sekitar 82.353 unit rumah hingga 100.000 unit rumah dengan jumlah penduduk kurang lebih mencapai 320.000 jiwa pada tahun 2045.

Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi yang terletak di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara yang memiliki daya tampung sekitar 10.000.000 m³ dengan kapasitas 2.500 liter /detik sebagai sumber mata air dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Ibu Kota Negara yang Baru. Sementara itu, untuk mempermudah akses masyarakat dari Balikpapan menuju pusat Ibu Kota Negara Baru, Pemerintah Kementerian PUPR membangun infrastruktur Jalan Lingkar Sepaku sepanjang 5,77 KM² yang dibagi dalam 3 segmen diantaranya, segmen satu sepanjang 1,75 KM², segmen dua sepanjang 1,85 KM², dan segmen tiga sepanjang 2,17 KM².

Tidak hanya pembangunan Jalan Lingkar Sepaku, Pemerintah Kementerian PUPR juga melakukan pembangunan infrastruktur Jalan Tol sepanjang 47 KM² yang menjadi penghubung antara daerah Sepinggian dengan Ibu Kota Negara yang berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Selain Jalan Tol tersebut, Pemerintah Kementerian PUPR merencanakan adanya pembangunan infrastruktur Tol Bawah Air yang menghubungkan antara Jalan Tol Balikpapan dengan Jalan Tol Samarinda melalui terowongan bawah air. Disamping itu, Menteri PPN atau Kepala Bappenas menanggapi adanya permintaan pembangunan infrastruktur Lahan SpaceX oleh Perusahaan Penerbangan Angkasa dari Amerika Serikat sebab penerbangan Ibu Kota Negara yang Baru dengan Amerika Serikat hanya memerlukan jarak tempuh dalam kurun waktu kurang dari 2 jam (PP RI No.18 Th.2020).

Upaya pembangunan infrastruktur tersebut sebagian besar didanai menggunakan Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sejalan dengan UU No. 10 Tahun 2008

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), pemerintah menerbitkan sukuk untuk keperluan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk pembiayaan proyek-proyek pemerintah seperti pembiayaan pembangunan infrastruktur. Selain itu, penerbitan Sukuk Ritel ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik secara umum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pembangunan jalan, pelabuhan, rel kereta api, dan lain-lain, sehingga dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, perekonomian masyarakat meningkat, dengan adanya pemerataan infrastruktur yang memperlancar masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi untuk menciptakan pemerataan dari pusat ke kota dan sebaliknya.

Kementerian Keuangan Sri Mulyani mengatakan, penyaluran sukuk proyek di Provinsi Kalimantan Timur dimulai pada 2014. Sejak saat itu, total alokasi sukuk proyek di daerah Kalimantan Timur mencapai Rp 6,48 triliun. Sebagian besar sukuk proyek yang dialokasikan di Provinsi Kalimantan Timur merupakan proyek prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kementerian PUPR. Sebesar 83,43% dana sukuk dialokasikan pada infrastruktur Jalan dan Jembatan pada Ditjen Bina Marga PUPR dan 1,44% pada infrastruktur Sumber Daya Air pada Ditjen Sumber Daya Air PUPR. Dan dana sukuk sebesar 15,13% digunakan untuk pembangunan infrastruktur Transportasi, Pendidikan Tinggi, Pendidikan Agama dan Islam dan sisanya digunakan untuk kepentingan pertahanan, keamanan dan sosial. Pembiayaan proyek melalui Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) merupakan sinergi antara Pemerintah Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Kementerian Bappenas dan Kementerian atau Lembaga untuk membiayai proyek atau kegiatan prioritas. Menurut Kementerian Keuangan, perkembangan pembiayaan proyek sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menunjukkan pertumbuhan setiap tahunnya.

Pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur yang sedang digarap maupun telah selesai

dikerjakan dengan menggunakan dana Sukuk Ritel diantaranya:

1. Pembangunan gedung pembelajaran pendidikan tinggi di Institut Teknologi Kalimantan, dengan alokasi dana sukuk sebesar Rp 86,6 miliar pada tahun 2019.
2. Pembangunan Laboratorium Terpadu pada tahun 2020 dengan dana sebesar Rp 99,9 miliar.
3. Pembangunan Bandara APT Pranoto di daerah Samarinda untuk mendukung konektivitas Ibukota Negara (IKN). Pembangunan APT Pranoto oleh dana sukuk yang akan digarap mulai tahun 2020 hingga 2023 dengan biaya sebesar Rp. 326,37 miliar.
4. Pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana Politeknik Negeri Balikpapan dengan alokasi dana sukuk sebesar Rp 65 miliar pada tahun 2021.
5. Pembangunan Rumah Prajurit TNI AD di Kodam VI Mulawarman dengan alokasi dana sukuk sebesar Rp 13,43 miliar pada tahun 2021. Pembiayaan sukuk daerah pada bidang Perumahan Prajurit TNI AD merupakan bagian dari Pembiayaan sukuk yang digunakan pada infrastruktur di bidang Perumahan TNI-Polri yang diperkirakan menghabiskan dana mencapai Rp 1,163 triliun pada tahun 2021.
6. Pembangunan MAN Insan Cendekia Paser dengan alokasi dana sukuk mencapai total Rp 53,9 miliar yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.

Dengan adanya penerbitan Sukuk Daerah oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Timur dapat mendorong pembangunan infrastruktur yang memadai di berbagai sektor yang ada di Kalimantan Timur. Hal ini terbukti dari adanya penerbitan Sukuk Negara sejak tahun 2008 lalu telah meningkatkan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia. Disamping itu, Sukuk Negara telah ikutserta mengambil andil secara langsung menjadi instrumen pembiayaan syariah yang terus berkembang dengan pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Sukuk Ritel merupakan produk investasi berbasis syariah yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan bagi investornya yang ditawarkan oleh pemerintah kepada Warga Negara Indonesia (WNI) secara individu. Tujuan utama dari adanya praktik penerbitan Sukuk Ritel oleh Pemerintah yaitu untuk pembiayaan infrastruktur pembangunan daerah di Indonesia. Sukuk ritel telah membiayai infrastruktur daerah yang ada di Indonesia sebanyak 4.316 proyek dengan dana sebesar Rp. 175,37 Triliun. Rincian pembiayaan proyek tersebut sebagai berikut: (1) pembangunan 1.446 proyek infrastruktur dan transportasi dengan dana senilai Rp. 142,26 Triliun. (2) pengembangan 1.038 proyek pendidikan dan riset dengan anggaran sebesar Rp. 22,19 Triliun. (3) Pembiayaan 1.578 proyek keagamaan dengan biaya sejumlah Rp. 4,32 Triliun. (4) Pengadaan 222 proyek pertahanan dan keamanan yang menghabiskan anggaran mencapai Rp. 3,04 Triliun. (5) Rp. 975 Miliar dana Sukuk Ritel yang digunakan untuk pembiayaan 32 proyek lainnya.

Kalimantan Timur merupakan daerah yang telah ditetapkan oleh Presiden RI Bapak Ir.H. Joko Widodo untuk dijadikan sebagai Ibu Kota Negara yang baru. Target pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur pada tahun 2024 mengharuskan Pemerintah gencar melakukan pengembangan daerah Kalimantan Timur dalam menunjang terlaksananya sistem pemerintahan di Ibu Kota Negara yang baru. Sukuk Ritel mendukung adanya pemindahan Ibu Kota Negara baru dengan pembiayaan infrastruktur pembangunan daerah Kalimantan Timur. Pembangunan infrastruktur yang akan dan sedang serta telah selesai digarap di Kalimantan Timur meliputi pembangunan Istana Negara, Kawasan Pemukiman, Bendungan Sepaku Semoi, Jalan Lingkar, Jalan Tol, Tol Bawah Air, Lahan SpaceX. Selain itu, Sukuk Ritel juga membiayai pengembangan infrastruktur Institut Teknologi Kalimantan, Laboratorium Terpadu, Bandara APT Pranoto di APT Pranoto, Politeknik Negeri Balikpapan, Rumah Prajurit TNI AD, dan MAN Insan Cendekia Paser.

Pemerintah khususnya pemerintah daerah Kalimantan Timur harus lebih aktif dalam mengenalkan dan mempromosikan produk Sukuk Ritel kepada Warga Negara Indonesia karena masih banyak masyarakat yang belum mengenal atau mengetahui Sukuk Ritel yang merupakan bentuk investasi berbasis syariah. Dengan gencarnya promosi Sukuk Ritel yang dilakukan pemerintah maka investor Sukuk Ritel akan terus meningkat. Sehingga dapat mengoptimalkan pembiayaan infrastruktur pembangunan daerah Indonesia terutama di Kalimantan Timur. Pada akhirnya dapat mewujudkan cita-cita negara Indonesia untuk menjadi bangsa yang mandiri.

5. REFERENSI

- Chotia, Varun and N.V.M. Rao. 2017. *Investigating the interlinkages between infrastructure development, poverty and rural-urban income inequality Evidence from BRICS nations. Studies in Economics and Finance*. Vol. 34 No. 4, pp. 466-484
- Ekene, Chukwuka, and Ananaba Ugwuonyi. 2016. *Leadership and Economic Development in a Developing Economy: A Critical Look at the Nigeria's' Experience. International Journal of Business and Management Review*, Vol.4, No.6, pp.105-114, August
- Fahri. 2021. *Peran Sukuk Bagi Pembangunan Infrastruktur Di Provinsi Jambi*. Jambi : Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
- Falah, Rais Muhamad. 2021. *Strategi Penerbitan Sukuk Daerah Untuk Pembiayaan Infrastruktur Di Jawa Barat*. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia
- Fauziah, Syifa, dan Nurwahidin. 2020. *Pembiayaan Infrastruktur Dengan Sukuk Negara Di Indonesia: Prosedur Dan Struktur* Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Vol. 4 No. 1
- Hadi, Fikri dan Rosa Ristawati. 2020. *The Relocation of Indonesia's Capital City and the Presidential Powers in Constitutional Perspective*. Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 3, September

- Herdiana, Dian. 2022. *Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*. Jurnal Transformative, Vol. 8 No. 1
- Ibu Kota Negara (IKN). 2022. *Infrastruktur Ibu Kota Baru Dibiayai Sukuk Negara, Ini Rinciannya*. Diakses pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2022, pukul 10.20 WIB. <https://ikn.go.id/infrastruktur-ibu-kota-baru-dibiayai-sukuk-negara-ini-rinciannya>
- Ilmia, Anisa. 2020. *Sukuk Negara dan Pembangunan Insfrastruktur Di Indonesia*. *Journal of Sharia Financial Management*, Volume 1, Nomor 2, Halaman 22-34
- Imam al-Mawardi. 2019. *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta : Qitshi Press.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2022. *SR 017 Pilihan Berharga Kuatkan Bangsa*. Diakses pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, pukul 00.29 WIB. <https://www.kemenkeu.go.id/sukukritel>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2022. *Green Sukuk Ritel Sukuk Tabungan Seri ST009 Pilihan Berharga Bersama Jaga Bumi Kita*. Diakses pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, pukul 00.40 WIB. <https://www.kemenkeu.go.id/sukuktabungan>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2022. *Marketing SR 017*. Diakses pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, pukul 00.21 WIB. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/9db54a68-f35e-4b89-8bf6-ffb4ea9a91b2/Marketing-SR017.pdf>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2022. *Marketing ST009*. Diakses pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, pukul 00.54 WIB. https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/6bc0d6a4-ef39-463f-85b8-00bf333a478c/Marketing-ST009_01.pdf
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2022. *Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara*. Diakses pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2022, pukul 07.32 WIB <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2022. *Pemindahan Ibu Kota Untuk Pacu Pemerataan dan Keadilan di Luar Pulau Jawa*. Diakses pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2022, pukul 13.02 WIB. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/20729/pemindahan-ibu-kota-untuk-pacu-pemerataan-dan-keadilan-di-luar-pulau-jawa/0/berita>
- Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha - Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (PDPPI) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko - Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2022. *Menggagas Pembiayaan Sukuk dalam Skema KPBU, untuk APBN yang Berkelanjutan*. Diakses pada hari Jum'at, tanggal 2 Desember 2022, pukul 08.11 WIB. <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/80-227/umum/kajian-opini-publik/menggagas-pembiayaan-sukuk-dalam-skema-kpbu-untuk-apbn-yang-berkelanjutan>
- Khairunnisa, Novia. 2021. *Analisis SWOT Potensi Penerbitan Green Sukuk Dalam Pembiayaan Insfrastruktur Aceh*. Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Linda, Sisi Ade. 2022. *Pemikiran Al-Mawardi dan Al-Ghazali Tentang Peran Negara dalam Hukum Ekonomi Islam*. Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah, Volume 5, Nomor 1, Juni, (PP: 1-13)
- Nurhayati, Dwi Astuti Wahyu. 2020. *Research Methodology*. Tulungagung : Akademia Pustaka.

- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024
- Pratiwi, Angrum, Dedy Mainata, dan Rizky Suci Ramadayanti. 2017. *Peran Sukuk Negara dalam Pembiayaan Infrastruktur*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 2, No. 2, Hal. 155-176
- Pribadi, Deny Slamet dan Setiyo Utomo. 2021. *Dampak Perpindahan Ibu Kota Negara terhadap Pemulihan Ekonomi dalam Perspektif Persaingan Usaha*. Jurnal Persaingan Usaha, Vol 1 No 2
- PT. Bareksa Portal Investasi. 25 Oktober 2022. *ST009 Segera Terbit, Ini Bedanya Sukuk Tabungan dengan Sukuk Ritel*. Diakses pada hari Jum'at, tanggal 2 Desember 2022, pukul 21.03 WIB. <https://www.bareksa.com/berita/sbn/2022-10-25/st009-segera-terbit-ini-bedanya-sukuk-tabungan-dengan-sukuk-ritel>
- PT. Bareksa Portal Investasi. 31 Agustus 2022. *SR017 Laku Keras, Sukuk Negara Telah Biayai Pembangunan 4.316 Proyek..* Diakses pada hari Jum'at, tanggal 2 Desember 2022, pukul 18.20 WIB. <https://www.bareksa.com/berita/sbn/2022-08-31/sr017-laku-keras-sukuk-negara-telah-biayai-pembangunan-4316-proyek>
- PT. Bareksa Portal Investasi. 22 Agustus 2022. *Apakah Investasi di Sukuk Ritel SR017 Berisiko? Begini Penjelasannya*. Diakses pada hari Jum'at, tanggal 2 Desember 2022, pukul 18.27 WIB. <https://www.bareksa.com/berita/sbn/2022-08-23/apakah-investasi-di-sukuk-ritel-sr017-berisiko-begini-penjelasannya>
- PT. Bareksa Portal Investasi. 31 Agustus 2020. *SR013 Biayai Infrastruktur, Ini Daftar Proyek yang Didanai Sukuk Negara*. Diakses pada hari Jum'at, tanggal 2 Desember 2022, pukul 18.15 WIB. <https://www.bareksa.com/berita/sbn/2020-08-31/sr013-biayai-infrastruktur-ini-daftar-proyek-yang-didanai-sukuk-negara>
- Rivai, Veithzal, dan Antoni Nizar Usman. 2012. *Islamic Economic & Finance : Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, tetapi Solusi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sukwika, Tatan. 2018. *Peran Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia*. Jurnal Wilayah Dan Lingkungan, Volume 6 Nomor 2, Agustus, 115-130
- Suriadi, Irwan, Siti Sriningsih, dan Hailudin. 2020. *Analisis Peluang Dan Tantangan Penerbitan Sukuk Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Di Nusa Tenggara Barat (NTB)*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol.6 No.2
- Todaro, M.P. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi 7. Jakarta : PT. Penerbit Erlangga